

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

DEWI DESRIANI

11373200189

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar atau bendaharawan, sistem ini memiliki nama withholding tax system. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian sehubungan dengan tatacara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi ke pustaka, wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penghitungan pajak Penghasilan pasal 21 yang dilakukan KPPN Rengat belum sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2008.

Kata kunci : PPh Pasal 21, PNS, Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrack

Public servant earn a steady income based on the salary and allowances. Public servant's income will become the subject of Income Tax Article 21, which is cut by the paymaster or treasurer. The system is known by the name of withholding tax system. The purpose of this study is to analyze and evaluate the suitability to the calculation procedurs, withholding, deposting, and reporting of income tax article 21 carries out by Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat with the Tax Act number 36 of 2008.this study uses descriptive qualitative method. The data uses are primary data and secondary data. The data was collected by means of Library Research, interviews and direct observasion in the field. The dat analysis method used is descriptive method and qualitative method. The result,

Keyword : income tax article 21, Public servant, withholding tax